



Analisis Efektivitas Program Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di DP3AKKB Provinsi Banten

Resma Cahya Fatimah¹, Gatot Hartoko², Eli Apud Saepudin³

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa, Serang,
Indonesia^{1,2,3}

resmacahya45@gmail.com, gatot.hartoko@binabangsa.ac.id,
eli.apud.saepudin@binabangsa.ac.id

*Email Korespodensi: resmacahya45@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 30-07-2026
Disetujui 01-08-2026
Diterbitkan 05-08-2026

ABSTRACT

The Family Planning (FP) Program is a strategic government policy aimed at controlling population growth, improving family welfare, and supporting sustainable development. In Banten Province, the implementation of the program continues to face challenges, including unequal access to family planning services, low male participation, and variations in contraceptive use across districts. This study aims to analyze the effectiveness of the Family Planning Program in controlling population growth at the Women's Empowerment, Child Protection, Population and Family Planning Office (DP3AKKB) of Banten Province. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through in-depth interviews, observations, documentation, and literature review. Data were analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing, supported by source and method triangulation to ensure validity. The findings indicate that the program has contributed to increasing contraceptive prevalence, strengthening reproductive health education, and enhancing coordination among stakeholders in population management. However, program effectiveness is still constrained by limited human resources, unequal service accessibility, and insufficient public awareness regarding family planning. Strengthening the capacity of field officers, expanding digital-based family planning services, and improving collaboration between government institutions, health providers, and communities are essential to enhance the effectiveness and sustainability of population control efforts in Banten Province.

Keywords: Family Planning Program; Effectiveness; Population Growth Control

ABSTRAK

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas keluarga, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Di Provinsi Banten, pelaksanaan Program KB masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses layanan antarwilayah, rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB, serta belum meratanya pemanfaatan alat dan metode kontrasepsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Program Keluarga Berencana dalam pengendalian pertumbuhan penduduk di Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi untuk menjamin validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program KB telah berkontribusi dalam meningkatkan penggunaan kontrasepsi, memperkuat edukasi kesehatan reproduksi, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pengendalian penduduk. Namun, efektivitas program masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, ketimpangan akses layanan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas penyuluh, optimalisasi layanan berbasis digital, serta peningkatan kolaborasi pemerintah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat guna mewujudkan pengendalian pertumbuhan penduduk yang efektif dan berkelanjutan di Provinsi Banten.

Katakunci: Program Keluarga Berencana; Efektivitas; Pengendalian Penduduk

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator demografi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan terhadap berbagai layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, lapangan pekerjaan, penyediaan pangan, serta infrastruktur publik. Di sisi lain, apabila pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan secara optimal, maka pemerintah memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan daya saing sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengendalian pertumbuhan penduduk menjadi salah satu agenda strategis dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia terus menghadapi tantangan dalam mengelola dinamika kependudukan. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk dan berbagai proyeksi kependudukan, jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya yang diikuti dengan perubahan struktur umur, mobilitas penduduk, urbanisasi, serta meningkatnya kebutuhan pelayanan publik. Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk melaksanakan kebijakan kependudukan yang komprehensif melalui pengendalian fertilitas, peningkatan kualitas keluarga, pengelolaan mobilitas penduduk, serta pembangunan keluarga yang berkualitas. Salah satu instrumen kebijakan yang telah diterapkan sejak lama adalah Program Keluarga Berencana (KB).

Program Keluarga Berencana merupakan program nasional yang bertujuan mewujudkan keluarga kecil berkualitas melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, pembinaan ketahanan keluarga, serta peningkatan kesehatan reproduksi. Program ini tidak hanya berorientasi pada penurunan angka kelahiran, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui perencanaan jumlah anak yang ideal, jarak kelahiran yang sehat, serta peningkatan kualitas pengasuhan anak. Dalam perkembangannya, Program KB telah mengalami perubahan paradigma dari sekadar pengendalian fertilitas menjadi pembangunan keluarga yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan Program KB memberikan kontribusi terhadap pencapaian berbagai indikator pembangunan,

antara lain penurunan Total Fertility Rate (TFR), peningkatan Contraceptive Prevalence Rate (CPR), penurunan angka kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need), peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta penguatan kualitas keluarga. Selain itu, Program KB juga berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan mengenai kesehatan yang baik, kesetaraan gender, pengurangan kemiskinan, serta pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, efektivitas implementasi Program KB menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan kependudukan di tingkat nasional maupun daerah.

Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang memiliki karakteristik kependudukan yang cukup kompleks. Sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Jakarta sekaligus kawasan industri, perdagangan, dan jasa, Provinsi Banten mengalami pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi akibat kombinasi antara pertumbuhan alami dan migrasi masuk. Kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap penyediaan pelayanan publik, peningkatan kebutuhan perumahan, penyediaan lapangan pekerjaan, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Selain itu, terdapat perbedaan karakteristik sosial ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Program KB. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan kebijakan pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk. Tugas tersebut dilaksanakan melalui berbagai program, antara lain pelayanan kontrasepsi, pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas, penyuluhan kesehatan reproduksi, peningkatan kapasitas penyuluh KB, pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), serta penguatan kemitraan dengan pemerintah kabupaten/kota, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Keberhasilan pelaksanaan program-program tersebut sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi, ketersediaan sumber daya, dukungan kebijakan, serta partisipasi aktif masyarakat. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, implementasi Program KB di Provinsi Banten masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, masih terdapat kesenjangan akses pelayanan KB antara wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan. Sebagian masyarakat di daerah tertentu masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh pelayanan kontrasepsi akibat faktor geografis, keterbatasan fasilitas kesehatan, maupun distribusi tenaga penyuluh KB yang belum merata. Kedua, tingkat partisipasi laki-laki dalam penggunaan metode kontrasepsi masih relatif rendah sehingga tanggung jawab pengendalian kelahiran lebih banyak dibebankan kepada perempuan. Ketiga, masih terdapat pasangan usia subur yang belum menggunakan alat kontrasepsi meskipun memiliki kebutuhan untuk menunda atau menghentikan kehamilan (unmet need).

Selain itu, perubahan sosial, budaya, dan ekonomi juga memengaruhi efektivitas Program KB. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan masyarakat memperoleh berbagai informasi mengenai kesehatan reproduksi dari berbagai sumber yang belum tentu memiliki validitas ilmiah. Di sisi lain, masih berkembang berbagai persepsi negatif mengenai penggunaan alat kontrasepsi yang menyebabkan sebagian masyarakat enggan mengikuti Program KB. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Program KB tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pelayanan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, edukasi, serta kemampuan pemerintah dalam membangun kepercayaan masyarakat. Efektivitas suatu program publik dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Dalam perspektif administrasi publik, efektivitas tidak hanya diukur dari pencapaian target kuantitatif, tetapi juga mencakup kualitas pelayanan, kepuasan masyarakat, efisiensi pelaksanaan program, keberlanjutan hasil, serta kemampuan organisasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas Program KB perlu

dilakukan secara komprehensif agar dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan maupun berbagai faktor penghambat implementasinya.

Menurut teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Richard M. Steers, efektivitas organisasi dipengaruhi oleh pencapaian tujuan, kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, integrasi antarunit organisasi, serta keberlangsungan organisasi dalam menjalankan fungsinya. Dalam konteks Program KB, efektivitas dapat dilihat dari sejauh mana program mampu meningkatkan cakupan peserta aktif KB, menurunkan angka kelahiran, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keluarga berencana, serta memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mendukung pembangunan kependudukan. Pendekatan ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam menilai keberhasilan implementasi Program KB di DP3AKKB Provinsi Banten. Penelitian mengenai efektivitas Program KB telah dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Program KB sangat dipengaruhi oleh kualitas penyuluhan, kompetensi petugas lapangan, dukungan pemerintah daerah, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan, serta tingkat partisipasi masyarakat. Namun demikian, sebagian penelitian masih berfokus pada aspek pelayanan kontrasepsi atau capaian indikator kependudukan tanpa mengkaji secara menyeluruh hubungan antara implementasi kebijakan, koordinasi kelembagaan, kualitas pelayanan, serta faktor sosial budaya yang memengaruhi efektivitas program di tingkat provinsi.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, terdapat kesenjangan penelitian (research gap). Pertama, masih terbatas penelitian yang secara khusus menganalisis efektivitas Program KB pada DP3AKKB Provinsi Banten sebagai organisasi yang memiliki kewenangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan keluarga. Kedua, sebagian penelitian lebih menitikberatkan pada indikator kuantitatif, sedangkan analisis terhadap faktor-faktor organisasi, koordinasi lintas sektor, komunikasi kebijakan, serta persepsi masyarakat masih relatif terbatas. Ketiga, dinamika pembangunan daerah, perkembangan teknologi informasi, serta perubahan karakteristik masyarakat memerlukan kajian yang lebih aktual mengenai efektivitas Program KB sebagai instrumen pengendalian pertumbuhan penduduk.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat mengingat Provinsi Banten menghadapi tantangan pembangunan yang cukup kompleks, terutama berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, peningkatan kebutuhan pelayanan dasar, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengendalian pertumbuhan penduduk yang efektif akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan daerah, pengurangan kesenjangan sosial, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta penguatan ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan nasional. Selain memiliki manfaat akademis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis bagi DP3AKKB Provinsi Banten dalam menyusun strategi peningkatan efektivitas Program KB. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas penyuluh KB, peningkatan kualitas pelayanan kontrasepsi, pengembangan strategi komunikasi publik, serta optimalisasi kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, fasilitas kesehatan, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan sektor swasta. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan dapat mendukung peningkatan kualitas tata kelola Program KB secara berkelanjutan.

Di samping itu, penelitian ini juga relevan dengan agenda pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang menegaskan bahwa pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Implementasi kebijakan tersebut memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat, pendanaan yang memadai, sumber daya

manusia yang kompeten, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Dengan memperhatikan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas Program Keluarga Berencana dalam pengendalian pertumbuhan penduduk di DP3AKKB Provinsi Banten. Analisis dilakukan terhadap aspek pencapaian tujuan program, kualitas implementasi kebijakan, koordinasi kelembagaan, ketersediaan sumber daya, partisipasi masyarakat, serta berbagai faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan program. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian administrasi publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan kependudukan, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas Program Keluarga Berencana guna mewujudkan pembangunan kependudukan yang berkualitas, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis efektivitas Program Keluarga Berencana (KB) dalam pengendalian pertumbuhan penduduk di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi program, pencapaian tujuan, serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Lokasi penelitian dilaksanakan di DP3AKKB Provinsi Banten dengan melibatkan informan yang dipilih secara purposive sampling, yaitu pejabat struktural, penyuluh keluarga berencana, pengelola program, serta pihak terkait yang memahami pelaksanaan Program KB. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan kinerja, dokumen kebijakan, data statistik kependudukan, serta berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan.

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi tahapan kondensasi data, penyajian data (data display), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Analisis efektivitas Program Keluarga Berencana mengacu pada teori efektivitas organisasi Richard M. Steers, yang menitikberatkan pada aspek pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi, dan keberlangsungan organisasi. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat efektivitas Program KB dalam pengendalian pertumbuhan penduduk di Provinsi Banten, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan bagi DP3AKKB Provinsi Banten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk sekaligus meningkatkan kualitas keluarga. Di Provinsi Banten, implementasi Program KB dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) melalui berbagai kegiatan, seperti pelayanan kontrasepsi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas, pendampingan keluarga berisiko stunting, serta peningkatan kapasitas penyuluh keluarga berencana. Pelaksanaan program melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain pemerintah kabupaten/kota,

puskesmas, rumah sakit, organisasi profesi, kader, dan tokoh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen, implementasi Program KB di DP3AKKB Provinsi Banten telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan nasional dalam pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk. Berbagai indikator menunjukkan adanya peningkatan cakupan pelayanan KB aktif, meningkatnya intensitas sosialisasi kepada pasangan usia subur (PUS), serta berkembangnya sinergi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan program. Meskipun demikian, efektivitas program masih menghadapi beberapa kendala, seperti ketimpangan akses pelayanan antarwilayah, keterbatasan jumlah penyuluh KB, rendahnya partisipasi pria dalam penggunaan kontrasepsi, serta masih adanya persepsi negatif masyarakat terhadap penggunaan alat kontrasepsi.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas Program KB, hasil penelitian dianalisis menggunakan teori efektivitas organisasi Richard M. Steers yang meliputi pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi, dan keberlangsungan organisasi.

1. Pencapaian Tujuan (Goal Attainment)

Pencapaian tujuan merupakan indikator utama dalam menilai efektivitas organisasi. Tujuan utama Program KB adalah mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, meningkatkan penggunaan kontrasepsi, memperkuat ketahanan keluarga, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3AKKB Provinsi Banten telah melaksanakan berbagai strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Pelayanan kontrasepsi dilaksanakan secara rutin melalui fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Selain itu, kegiatan pelayanan KB gratis secara berkala mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap alat dan obat kontrasepsi. Program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kesehatan reproduksi dan pentingnya perencanaan keluarga. Penyuluhan dilakukan melalui pertemuan kelompok masyarakat, media sosial, media cetak, radio, serta berbagai kegiatan pelayanan terpadu di tingkat desa dan kelurahan. Meskipun demikian, pencapaian tujuan belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat pasangan usia subur yang belum menjadi peserta aktif KB, terutama di wilayah dengan tingkat pendidikan rendah dan akses pelayanan yang terbatas. Selain itu, angka kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need) masih menjadi tantangan dalam upaya pengendalian fertilitas.

Berdasarkan teori Steers, pencapaian tujuan organisasi dinilai cukup efektif karena sebagian besar target program dapat direalisasikan, namun masih memerlukan peningkatan kualitas pelayanan dan pemerataan akses agar seluruh masyarakat memperoleh manfaat yang sama.

2. Integrasi (Integration)

Integrasi menunjukkan kemampuan organisasi dalam membangun koordinasi, komunikasi, dan kerja sama dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Implementasi Program KB tidak dapat dilaksanakan hanya oleh DP3AKKB, tetapi membutuhkan dukungan lintas sektor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara DP3AKKB Provinsi Banten dengan pemerintah kabupaten/kota, Dinas Kesehatan, BKKBN, puskesmas, rumah sakit, organisasi profesi, serta kader KB telah berjalan cukup baik. Bentuk koordinasi diwujudkan melalui rapat koordinasi, pelaksanaan pelayanan KB terpadu, pertukaran data kependudukan, serta pelaksanaan kegiatan edukasi secara bersama.

Keberadaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) menjadi faktor penting dalam memperkuat integrasi program di tingkat masyarakat. Penyuluh berperan sebagai fasilitator, komunikator, sekaligus pendamping keluarga dalam memperoleh pelayanan KB. Selain itu, keterlibatan kader dan tokoh masyarakat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Namun

demikian, integrasi masih menghadapi beberapa hambatan. Perbedaan kapasitas kelembagaan antarwilayah menyebabkan kualitas pelaksanaan program belum merata. Sistem pertukaran data antarlembaga juga belum sepenuhnya terintegrasi sehingga proses monitoring dan evaluasi memerlukan waktu yang lebih lama. Di beberapa daerah, koordinasi lintas sektor masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menghasilkan inovasi pelayanan yang berkelanjutan. Dalam perspektif teori Steers, kemampuan organisasi membangun integrasi telah berjalan cukup efektif, tetapi masih membutuhkan penguatan sistem koordinasi digital, sinkronisasi data, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor.

3. Adaptasi (Adaptation)

Adaptasi merupakan kemampuan organisasi menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, perkembangan teknologi, serta dinamika kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3AKKB Provinsi Banten telah melakukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan Program KB. Salah satunya adalah pemanfaatan media digital sebagai sarana penyebarluasan informasi mengenai kesehatan reproduksi, pelayanan kontrasepsi, dan pembangunan keluarga. Penyuluhan yang sebelumnya lebih banyak dilakukan secara tatap muka kini dipadukan dengan media sosial, aplikasi komunikasi, serta platform informasi digital sehingga jangkauan edukasi menjadi lebih luas. Selain itu, materi penyuluhan juga disesuaikan dengan karakteristik sasaran. Bagi remaja lebih banyak diberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan, sedangkan bagi pasangan usia subur difokuskan pada manfaat penggunaan kontrasepsi serta perencanaan keluarga.

Meskipun demikian, kemampuan adaptasi masih menghadapi beberapa kendala. Tidak seluruh masyarakat memiliki tingkat literasi digital yang sama. Di wilayah pedesaan, keterbatasan jaringan internet serta rendahnya kemampuan pemanfaatan teknologi menyebabkan penyampaian informasi belum optimal. Selain itu, sebagian penyuluh masih memerlukan peningkatan kompetensi dalam penggunaan media digital sebagai sarana edukasi masyarakat. Menurut teori Steers, kemampuan adaptasi organisasi dapat dikategorikan cukup baik karena mampu merespons perkembangan lingkungan, meskipun peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemerataan akses teknologi masih menjadi kebutuhan utama.

4. Keberlangsungan Organisasi (Organizational Survival)

Keberlangsungan organisasi menunjukkan kemampuan mempertahankan pelaksanaan program secara berkesinambungan melalui dukungan sumber daya manusia, pendanaan, kelembagaan, dan kebijakan. Penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan Program KB di Provinsi Banten didukung oleh adanya kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjadikan pembangunan keluarga sebagai salah satu prioritas pembangunan. Dukungan anggaran, keberadaan penyuluh KB, serta kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi modal utama dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan program. Selain itu, pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas menjadi strategi untuk memperkuat keberlanjutan program melalui pemberdayaan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berorientasi pada pelayanan kontrasepsi, tetapi juga mencakup peningkatan pendidikan keluarga, kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi keluarga, perlindungan anak, dan penurunan angka stunting. Namun demikian, keberlangsungan program masih dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah tenaga penyuluh, regenerasi kader yang belum optimal, serta ketergantungan terhadap dukungan anggaran pemerintah. Perubahan dinamika sosial dan meningkatnya mobilitas penduduk juga menjadi tantangan dalam mempertahankan keberhasilan Program KB di masa mendatang. Berdasarkan teori Steers, aspek keberlangsungan organisasi telah menunjukkan kondisi yang cukup baik karena didukung oleh regulasi, kelembagaan, dan komitmen pemerintah. Akan tetapi, keberlanjutan program akan lebih optimal apabila diikuti dengan peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi pelayanan, inovasi komunikasi publik, serta penguatan partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Program Keluarga Berencana di DP3AKKB Provinsi Banten secara umum berada pada kategori cukup efektif. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya akses pelayanan kontrasepsi, berkembangnya kegiatan komunikasi dan edukasi masyarakat, serta terjalinnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung pengendalian pertumbuhan penduduk. Program KB juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas keluarga melalui penguatan kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas, dan pendampingan keluarga berisiko stunting. Namun demikian, efektivitas program masih dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, belum meratanya distribusi penyuluh keluarga berencana, rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB, masih adanya persepsi negatif terhadap penggunaan kontrasepsi, serta belum optimalnya integrasi data dan pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas penyuluh, peningkatan kualitas layanan berbasis digital, integrasi sistem informasi kependudukan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar Program Keluarga Berencana mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mewujudkan pengendalian pertumbuhan penduduk dan pembangunan keluarga yang berkualitas di Provinsi Banten.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Berencana (KB) di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten telah berjalan cukup efektif dalam mendukung pengendalian pertumbuhan penduduk. Hal tersebut ditunjukkan melalui pencapaian tujuan program yang tercermin dari meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kontrasepsi, pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang semakin luas, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan keluarga. Ditinjau berdasarkan teori efektivitas organisasi Richard M. Steers, aspek pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi, dan keberlangsungan organisasi telah menunjukkan kinerja yang baik, meskipun tingkat efektivitasnya masih memerlukan peningkatan pada beberapa aspek. Program KB tidak hanya berkontribusi dalam pengendalian angka kelahiran, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas keluarga, kesehatan reproduksi, serta pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan di Provinsi Banten.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor yang masih menghambat efektivitas Program Keluarga Berencana, antara lain keterbatasan jumlah dan kapasitas penyuluh keluarga berencana, belum meratanya akses pelayanan di seluruh wilayah, rendahnya partisipasi pria dalam penggunaan kontrasepsi, masih adanya persepsi negatif masyarakat terhadap program KB, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan pelayanan. Oleh karena itu, DP3AKKB Provinsi Banten perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia, memperluas inovasi pelayanan berbasis digital, meningkatkan kualitas komunikasi publik, mengintegrasikan sistem informasi kependudukan, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, fasilitas kesehatan, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas Program Keluarga Berencana secara berkelanjutan sehingga dapat mendukung terwujudnya pengendalian pertumbuhan penduduk, pembangunan keluarga berkualitas, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2021). *Laporan Kinerja BKKBN Tahun 2021*. Jakarta: BKKBN.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2022). *Laporan Kinerja BKKBN Tahun 2022*. Jakarta: BKKBN.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2023). *Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana*. Jakarta: BKKBN.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2024). *Peraturan BKKBN Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025*. Jakarta: BKKBN.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2025). *Laporan Kinerja Direktorat Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Khusus Tahun 2024*. Jakarta: BKKBN.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Jakarta: BPS.
- Elfiyan, I. (2025). Efektivitas Kebijakan Keluarga Berencana dalam Mengoptimalkan Peran Pria di Indonesia. *Bappenas Working Papers*, 8(3), 521–536.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN. (2025). *Infografik Indikator Kinerja Utama Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2022). *Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023*. Jakarta: Bappenas.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2024). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045*. Jakarta: Bappenas.
- Mahdani, S. (2024). Efektivitas Program Keluarga Berencana di Kota Medan: Tinjauan Komunikasi Publik Melalui Media Sosial. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies*, 2(5), 6–11.
- Prasetya, L. K. B. (2024). Tantangan Menuju Prevalensi Stunting 14%: Mengapa Penurunan Prevalensi Stunting dalam Dua Tahun Terakhir Sangat Kecil di Indonesia. *Jurnal Keluarga Berencana*, Edisi Khusus, 1–7.
- Sonia, M. (2024). Efektivitas Program Keluarga Berencana di Kota Medan: Tinjauan Komunikasi Publik Melalui Media Sosial. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies*, 2(5), 6–11.
- Syifaurochmah, M., Kismartini, K., & Rahman, A. Z. (2023). Komunikasi Kebijakan Keluarga Berencana Pria di Kecamatan Tugu Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(4), 635–651.
- Triadi, R. S. (2024). Tantangan dan Dampak Putus Pakai Kontrasepsi terhadap Pencapaian Target Keluarga Berencana di Indonesia. *Jurnal Keluarga Berencana*, 9(Edisi Khusus), 14–27.
- United Nations Population Fund. (2023). *State of World Population 2023: 8 Billion Lives, Infinite Possibilities*. New York: UNFPA.

World Health Organization. (2022). *Family Planning/Contraception: Evidence and Recommendations*. Geneva: World Health Organization.

